



Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Universitas Muhammadiyah Jakarta

Farah Shafira Firmanto

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Evi Satispi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Korespondensi penulis: farahshafirafirmanto@email.com

Abstract: *This article discusses the implementation of the Independent Campus Learning Policy at Muhammadiyah University Jakarta. The aim of this research is to find out and analyze the implementation of the independent campus learning policy at the Muhammadiyah University in Jakarta. This research theory uses policy implementation theory in the George Edwards III model. By using descriptive methods and qualitative approaches. Data collection uses interview, observation and documentation methods. The research results from 4 (four) indicators show that communication needs to be carried out more massively because there are several lecturers who do not understand the conversion and know the mechanisms in the Independent Learning Campus policy. Resources are sufficient, but supervision needs to be increased because there is still a lack of supervision. Disposition, having responsibility as evidenced by commitment to implementing the Independent Campus Learning Policy. Bureaucratic structure, policies are carried out in accordance with SOP. The technical data analysis carried out is data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show that the implementation of the Merdeka Belajar Kampus Merdeka policy is good, but it is hoped that it will be further improved regarding technical matters regarding Merdeka Belajar Kampus Merdeka as well as providing an information system (IT) to make it easier to implement Merdeka Belajar Kampus Merdeka.*

Keywords: Policy Implementation, Independent Learning Independent Campus

Abstrak: Artikel ini membahas perihal implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tujuan dari penelitian ini buat mengetahui dan menganalisa implementasi kebijakan merdeka belajar kampus merdeka di universitas muhammadiyah jakarta. Teori penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan pada model George Edwards III. dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Pengambilan data menggunakan metode wawancara, observasi, serta dokumentasi. akibat penelitian berasal 4 (empat) indikator bahwa komunikasi perlu dilakukan sosialisasi lebih masif sebab ada beberapa Dosen yg belum memahami mengenai konversi mengetahui terkait prosedur pada kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. asal Daya, sudah relatif memadai, namun perlu ditingkatkan supervisi karena masih ditemukan kurangnya pengawasan. Disposisi, mempunyai tanggung jawab yg dibuktikan dengan komitmen pada melaksanakan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka tadi. Struktur Birokrasi, kebijakan dilakukan sinkron dengan SOP. Teknis analisis data yang dilakukan ialah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. hasil penelitian bahwa pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sudah baik tetapi diharapkan lebih ditingkatkan lagi tentang hal hal yg teknis tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan memberikan sistem informasi (IT) supaya memudahkan dalam pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah proses memanusiakan insan agar bisa mengaktualisasikan diri pada kehidupan, dimana pendidikan yg baik merupakan pendidikan yang tak hanya mempersiapkan para siswanya buat suatu profesi atau jabatan, tetapi buat menyelesaikan problem masalah yang pada hadapi pada kehidupan sehari-hari. Idealnya pendidikan tak hanya mendorong siswa buat berbagi talenta yang diadaptasi dengan ilmu yang pada peroleh pada sekolah, tapi pendidikan juga bertujuan buat menaikkan kualitas manusia yaitu insan yg beriman serta bertakwa pada yang kuasa yg Maha Esa, berbudi, berdisiplin, beretos kerja, profesional, tanggung jawab produktif, dan sehat jasmani dan rohani. dari Undang-undang angka 20 tahun 2003 wacana Sistem Pendidikan Nasional sudah kentara mengungkapkan bahwa pendidikan nasional berfungsi membuat kemampuan dan membuat watak serta mendorong bangsa yg cerdas mesti diawali menggunakan pemenuhan hak pendidikan kepada semua warga indonesia.

Pemenuhan hak tersebut telah dituangkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 Pasal 28C Ayat (1) “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan serta memperoleh manfaat berasal ilmu pengetahuan serta teknologi, seni serta budaya, demi mempertinggi kualitas hidupnya serta demi menaikkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat insan. Pentingnya pendidikan mulai berasal SD (Sekolah Dasar) sampai menggunakan Perguruan Tinggi (PT) membentuk kementerian seringkali mengeluarkan kebijakan baru buat mendorong proses pendidikan yang lebih baik. salah satu misalnya, pada pemerintahan jokowi pada Kabinet Indonesia Maju 2019- 2024. Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan yang ketika ini pada pimpin oleh Nadiem Makarim sudah mengeluarkan kebijakan baru yaitu acara Merdeka Belajar- Kampus Merdeka. Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan pada dalam acara Studi dan pada luar acara Studi meliputi: Pertukaran pelajar, Magang, Asistensi Mengajar, Penelitian, Proyek kemanusiaan, kegiatan Wirausaha, Studi Proyek Independen, membangun Desa.

Pada rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan buat lebih gayut menggunakan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja menggunakan dunia indutrsi serta global kerja tetapi juga menggunakan masa yang berubah dengan cepat. Perguruan tinggi dituntut buat bisa merancang serta melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif supaya mahasiswa bisa meraih capaian pembelajaran mencakup aspek perilaku, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut, Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa selain itu memberi kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi swasta dan hak belajar tiga semester mahasiswa di luar program studi, Tiga semester yang dimaksud adalah berupa satu semester berkesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan dua semester melakukan aktivitas pembelajaran diluar perguruan tinggi. Setiap mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengambil Satuan Kredit Semester (SKS) di luar program studi. Perancang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka untuk menyiapkan mahasiswa mampu menghadapi perkembangan zaman mulai dari perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemampuan teknologi. Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka bertujuan mengembangkan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian mahasiswa.

Melalui program MBKM, dikenal adanya banyak sekali aktivitas unggulan yang dapat dilakukan di luar kampus antara lain: Magang/praktek kerja, yakni aktivitas magang pada sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup). Proyek pada desa, yakni proyek sosial buat membantu rakyat pada pedesaan atau wilayah terpencil pada menyambut ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. Mengajar pada sekolah berupa kegiatan mengajar pada SD, menengah, maupun atas selama beberapa bulan menggunakan domisili sekolah yang berada pada lokasi kota maupun terpencil. Pertukaran Pelajar yakni merogoh kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri juga dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan pemerintah. Penelitian/riset aktivitas riset akademik baik sains maupun sosial humaniora, yg dilakukan pada bawah pengawasan dosen atau peneliti. aktivitas wirausaha, yakni mahasiswa mengembangkan aktivitas kewirausahaan secara berdikari dibuktikan menggunakan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip honor pegawai. Studi/ Proyek independent, yakni mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial spesifik dan bisa dikerjakan beserta-sama dengan mahasiswa lain. Proyek humaniora, berupa kegiatan sosial buat sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik pada pada maupun pada luar negeri.

Menyambut kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimaksud, Universitas Muhammadiyah Jakarta segera menyesuaikan berbagai regulasi yang berlaku di

lingkungan universitas, fakultas dan program studi, dengan memberlakukan regulasi MBKM. sebagai berikut: Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 696 Tahun 2019 tentang Pengembangan, Pemutakhiran, dan Peninjauan Kurikulum Universitas Muhammadiyah Jakarta; Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 486 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum MBKM di Universitas Muhammadiyah Jakarta; Buku Pedoman Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) Universitas Muhammadiyah Jakarta; Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 488A Tahun 2020 tentang Pertukaran Mahasiswa application Merdeka Belajar Kampus Merdeka; Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 489A Tahun 2020 tentang Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan software Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nomor 285 Tahun 2021 tentang panduan Magang pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Universitas Muhammadiyah Jakarta. dalam penerapan MBKM tentunya terdapat peran acara Studi dalam melaksanakan kebijakan MBKM karena program Studi ditantang dalam membuat kurikulum yang adaptif dan bisa mengikuti keadaan dengan perkembangan zaman yang semakin pesat tanpa keluar asal tujuan dalam menghasilkan lulusan sesuai menggunakan capaian pembelajaran yang sudah dipengaruhi. pada samping itu, pada implementasi kebijakan MBKM diharapkan adanya kerja sama dan kolaborasi dengan mitra ataupun pihak lain yang berkaitan dengan bidang keilmuannya dan turut dan dalam mendukung capaian pembelajaran yang pada inginkan.

Keadaan yang terjadi di lapangan dengan adanya kebijakan MBKM ini acara MBKM pada UMJ belum melaksanakan secara menyeluruh di Fakultas- Fakultas yang terdapat di UMJ, sehingga belum mampu dilaksanakan pertukaran pelajar antar Fakultas atau prodi, program studi mengalami kesulitan dalam pendataan, menghasilkan laporan karena masih membuat secara manual sehingga membentuk pembuatannya menjadi lama , belum adanya sistem teknologi informasi (IT) yang mendukung supaya mempermudah aplikasi kegiatan MBKM, selain itu Universitas Muhammadiyah Jakarta belum memiliki panduan buku Operasional (POB) sehingga koordinasi antara Universitas menggunakan prodi belum berjalan dengan lancar. hanya terdapat panduan kurikulum saja padahal pedoman tersebut dibutuhkan supaya pelaksanaannya sesuai. kemudian yang dirasakan sang prodi tentang Capaian Pembelajaran yang kurang sesuai dengan mata kuliah sehingga penetapan mata kuliah yg dikonversi belum terlalu sesuai. berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti

tentang bagaimana “Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Universitas Muhammadiyah Jakarta”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode mengumpulkan data memakai teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Informan penelitian ini berjumlah 13 orang yang mencakup Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dekan Fakultas, Wakil dekan serta ketua Prodi. Teknik *purposive* sampling. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan menggunakan menggunakan model berdasarkan teori Implementasi Kebijakan oleh Edwad III.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Muhammadiyah Jakarta ajkan diketahui pelaksanaannya baik atau tidak dengan tersaji sesuai teori implementasi kebijakan. dari Edward III (subarsono,2011) terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan asal aplikasi suatu kebijakan yaitu Komunikasi, asal Daya, Disposisi dan Stuktur Birokrasi.

Komunikasi

Berdasarkan keterangan dari informan diatas mengenai indikator kejelasan ini bahwa akses informasi diatas mengenai indikator kejelasan bahwa akses informasi yang di berikan mengenai kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sudah dilakukan pada para petinggi di Universitas Muhammadiyah Jakarta melalui beberapa cara seperti rapat, *zoom assembly* dan plattform media sosial yang dimiliki untuk di sebarluaskan.

Berdasarkan hasil observasi dilakukan dalam mencari informasi seputar Merdeka Belajar Kampus Merdeka bahwa pihak Universitas Muhammadiyah Jakarta memberikan akses informasi kepada para Kepala prodi, Dosen dan Mahasiswa melalui beberapa platform seperti media sosial dan nomor group of workers bidang Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Berdasarkan dokumentasi yang didapat mengenai kejelasan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sudah memberikan akses informasi tentang sosialisasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka kepada Kepala software Studi, Mahasiswa salah satunya melalui akun instagram yang dimiliki dan kontak whatsapp bidang MBKM yang siap melayani Kepala Prodi atapun Mahasiswa jika ada yang ingin ditanyakan.

Sumber Daya

Dari hasil wawancara yang dilakukan Wakil Rektor 1, Bidang Pengembangan Prodi dan MBKM dan Kepala Prodi Administrasi Publik bahwasannya memang sarana yang diberikan dari universitas untuk Kepala Prodi kurang memadai karena jalur koordinasi dari Universitas ke Wakil Dekan lalu disampaikan lagi ke Kepala Prodi selain itu Kepala Prodi mengeluhkan tentang prasarana yang tidak mendukung untuk pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka semua prasarana lebih difokuskan untuk mahasiswa. Berdasarkan hasil keterangan dari informan diatas mengenai indikator fasilitas dalam pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka fasilitas yang dimiliki hanya difokuskan untuk mahasiswa padahal para kepala application studi juga membutuhkan prasarana yang memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan MBKM.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan saat wawancara berada dilapangan bahwa indikator fasilitas dalam hal ini memang belum memadainya prasarana untuk kelancaran Kepala program Studi dalam menjalankan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka seperti membuat laporan, pendataan, dll dilakukan secara manual. Menilai terkait fasilitas yang mendukung untuk Kepala Prodi dalam pelaksanaan MBKM cukup kurang memadai padahal mereka sangat membutuhkan prasarana yang baik untuk memudahkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan menggunakan teknik triangulasi didapatkan dari hasil analisis wawancara, observasi dikaitkan dengan Teori Edward III indikator fasilitas dalam pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka belum memadainya fasilitas untuk Kepala program Studi padahal mereka sangat membutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan MBKM ini sehingga sampai saat ini mereka membuat laporan kegiatan, pendataan, dll masih secara *guide* yang membuat prosesnya semakin lama.

Disposisi

Sesuai yang akan terjadi wawancara yg dilakukan dari informan diatas mengenai indikator insentif dalam Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka bahwa penerangan berasal Wakil Rektor 1 atau asal pihak internal Universitas Muhammadiyah Jakarta memiliki BPM (Badan Pengendalian Mutu) yang melakukan supervisi ke setiap fakultas dan mengadakan monev bersama buat menyampaikan controlling selama aktivitas tetapi di nyatanya dalam wawancara menggunakan kepala program Studi mengatakan tidak terdapat supervisi yang dilakukan pihak internal. Selain itu tentang pendanaan buat melaksanakan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini memang mendapatkan Dana hibah dari Pemerintah buat melaksanakan MBKM namun aplikasi yang Non hibah seperti program

berdikari yg dibuat sang acara Studi mengalami minim pendanaan yg diberikan sang pihak internal.

Berdasarkan hasil observasi yg dilakukan supervisi pada Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka asal pihak internal tidak terlalu khusus terjadi dan kenyataannya monev jarang terjadi kontroling ke fakultas dan pendanaan sebab mendapatkan bantuan gratis berasal pemerintah hanya ada yang mengeluh wacana dana yang turunnya usang buat Non bantuan gratis yang dilakukan sang ketua acara Studi buat membentuk kegiatan mendapatkan minim pendanaan asal pihak internal.

Struktur Birokrasi

Sesuai hasil wawancara yg dilakukan peneliti menggunakan beberapa informan berkata bahwa stakeholder yang dilibatkan selain kepala program Studi, Sekretaris Prodi serta Staf prodi merupakan kawan buat membantu berafiliasi menjalankan kegiatan MBKM. yang akan terjadi warta dari informan diatas tentang Fragmentasi dalam melaksanakan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka para kepala acara Studi melakukan kerjasama dengan kawan menggunakan membentuk MoU terlebih dahulu buat perjanjian.

Berdasarkan hasil observasi yg dilakukan bahwa dalam Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka telah bekerjasama dengan beberapa mitra setiap program Studi memiliki Mitranya tersendiri sinkron menggunakan bidangnya. Ini menjadi salah satu cara buat menjalankan Kebijakan MBKM meminimalisir pendanaan sebab bekerjasama dengan mitra tidak mengeluarkan biaya .

Dengan memakai Teknik Triangulasi dihasilkan berasal hasil anailisis wawancara serta observasi dikaitkan menggunakan Teori Edward III indikator Fragmentasi dalam Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka bahwa dapat dihasil pihak Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak mempunyai SOP yang spesifik mengenai kebijakan MBKM sehingga para ketua program Studi hanya mengikuti dari pemerintah saja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagaimana pada hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Muhammadiyah Jakarta sudah baik tapi masih perlu ditingkatkan dalam informasi serta koordinasi terkait pelaksanaan MBKM tersebut. sesuai hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka asal hasil penelitian dan analisis yang dilakukan buat menutupi yang kurang, maka didapatkan suatu saran menjadi berikut: Pihak Universitas Muhammadiyah Jakarta hendaknya mengaktifkan kembali forum khusus yg telah lama tidak ada supaya

memudahkan pada koordinasi pelaksanaannya sehingga tidak terpisah-pisah lagi. tentang sosialisasi serta pengawasan lebih diperhatikan lagi serta ditingkatkan lagi secara rutin sebab masih terdapat yang belum terlalu paham tentang MBKM. lalu hendaknya lebih mempertinggi koordinasi yang jelas pada aplikasi MBKM serta pedoman aplikasi MBKM sebab banyak yang merasa resah dengan Kebijakan MBKM ini harusnya seperti apa karena panduan dari pemerintah hanya mengungkapkan secara umum saja. dan hendaknya menghasilkan *website* spesifik MBKM yang mampu diakses sang semua pelaksana serta berisikan paduan pendaftaran , pembuatan laporan serta logbook untuk melaporkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan demikian, peneliti ingin memakai kesempatan ini buat berterima kasih pada semua pihak yang membantu peneliti menggunakan persiapan serta penyusunan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Puspitasari, Ratna, and Riant Nugroho. "Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka FISIP UPN Veteran Jawa Timur." *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 11.2 (2021).
- Asiah, Nur. *Implementasi kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka (studi pada fakultas ilmu sosial dan hukum universitas negeri makassar)*. Diss. UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR, 2021.
- Nofia, Nensi Nofa. "Analisis tantangan implementasi kebijakan “merdeka belajar kampus merdeka” pada perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia." *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1.2 (2020).
- Elih, Y. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. 30, 129–153. Fredrik, K. A. (2022). Rebalancing Kebijakan, Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.1(April), 1–14. Halim, C. M. A. (2021). Ketercapaian dan kendala implementasi mbkm di prodi teknik sipil universitas widyagama malang. Ciastech, 1017–1024.
- Haryanto, H. C., & Widyaningsih, A. (2022). Dinamika Pengelolaan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Pada Kampus Swasta. May. <https://doi.org/10.30605/jsgp.5.1.2022.1557>
- Kholik, A., Bisri, H., Lathifah, Z. K., & Kartakusuma, B. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) berdasarkan Persepsi Dosen dan Mahasiswa. 6(1), 738–748.

Buku :

- Dirjen Dikti Kemdikbud. (2020). Buku Panduan Pelayanan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 1–33.
<http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Buku-PanduanMerdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-2020>
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: GadjahMada University Press.
- Dwijowijoto, R. N. (2005). Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi. Jakarta: PT Gramedia.
- Wahab, S. A. (2008). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo. (2011). Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses. Malang: Bayu Media. Winarno, B.
- Subarsono.(2011). Analisis Kebijakan Publik (Konsep. Teori Dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono.(2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2008). Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Publik. Dalam Suharno, PrinsipPrinsip Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press.
- Rian. N.D . 2017. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Ahmad, J. (2015). Metode Penelitian Administrasi Publik Teori Dan Aplikasi. Yogyakarta: Gava Media.
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Dwijowijoto,
- R. N. (2005). Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi. Jakarta: PT Gramedia. Emzir. (2014). Metode Penelitian Kualitatif, Analisis Data. Jakarta: PT Rajawali Grafindo Perkasa.
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya. Hardiansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media. Islamy, I. (2009). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksar